

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Efektivitas implementasi *e-Berpadu* di Pengadilan Negeri Bojonegoro pada dasarnya telah memberikan kontribusi nyata dalam modernisasi administrasi peradilan dan mendukung terwujudnya prinsip-prinsip *good governance* melalui transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi proses perkara pidana.

Namun, efektivitas tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, kesiapan SDM yang belum merata, dan perbedaan SOP antar lembaga penegak hukum yang menimbulkan potensi ketidakterseragaman. Untuk mengatasi hal tersebut, Pengadilan Negeri Bojonegoro melakukan sejumlah upaya, antara lain penyusunan SOP internal, pelatihan aparatur, serta peningkatan koordinasi dengan Polri dan Kejaksaan. Kendati demikian, agar efektivitas *e-Berpadu* dapat terwujud secara maksimal, diperlukan dukungan regulasi teknis dan standarisasi nasional dari Mahkamah Agung sehingga implementasinya berjalan seragam, konsisten, dan sejalan dengan prinsip *good governance* dalam sistem pemerintahan.

4.2 Saran

a) Perlu Segera Diterbitkannya Petunjuk Teknis Nasional

Mahkamah Agung diharapkan segera menyusun dan menerbitkan petunjuk teknis (juknis) yang bersifat nasional dan komprehensif terkait implementasi *e-berpadu*, khususnya yang mengatur hal-hal teknis seperti format standar dokumen, prosedur unggah, validasi sistem, mekanisme koreksi kesalahan unggah, serta tanggung jawab antar instansi. Juknis ini harus mencakup SOP baku yang berlaku seragam untuk seluruh pihak, baik pengadilan, kejaksaan, kepolisian, maupun instansi pendukung lainnya, agar tidak terjadi perbedaan persepsi dan praktik di lapangan.

b) Pengembangan Sistem Validasi Otomatis dan Notifikasi Cerdas

Dibutuhkan penguatan sistem *e-Berpadu* melalui fitur validasi otomatis yang mampu mendeteksi kesalahan unggah (seperti format tidak sesuai, dokumen belum ditandatangani, atau isian form tidak lengkap). Sistem juga perlu dilengkapi dengan notifikasi pintar dan real-time bagi petugas maupun pemohon, agar proses unggah, penandatanganan, dan verifikasi dokumen dapat berjalan lebih akurat dan efisien.

c) Peningkatan Infrastruktur dan Kestabilan Server Nasional

Mahkamah Agung melalui Pusat Teknologi Informasi (Pusintek) perlu memastikan bahwa kapasitas server *e-Berpadu* mampu menangani lalu lintas data yang tinggi, terutama pada jam sibuk. Peningkatan bandwidth, penguatan keamanan siber, serta pengembangan sistem cadangan (backup

server) akan sangat penting untuk menjamin ketersediaan layanan tanpa gangguan (down time), sehingga pelayanan publik tetap dapat berjalan optimal.